

Melacak Pikiran Politik Gusdur Dalam Koran Petisi Tahun 1998-1999

Roni Ali Rahman¹⁾, Diyanatil Azkiya²⁾ dan Ifan Ali Alfatani³⁾ Siti Khoirun Nisak⁴⁾

¹⁾Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
roni.alialfatani@gmail.com

²⁾ Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
diyanatilazkiya@gmail.com

³⁾Institut Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki Bondowoso
Ifanialifatani206@gmail.com

⁴⁾MTs Nurul Huda Nogosari
nisak@gmail.com

Abstract: *This study explores the political thoughts of Abdurrahman Wahid (Gus Dur) as published in the Petisi newspaper during the 1998-1999 period. The main focus is on how Gus Dur conveyed ideas about democracy, pluralism, human rights, and political transition post-New Order through mass media. Petisi played a crucial role as a platform for delivering progressive ideas during the reform era. A literature review method is employed to analyze Gus Dur's writings, including key themes such as the protection of minorities, political stability, and the separation of religion from practical politics. The research findings indicate that Gus Dur's thinking promoted a peaceful, inclusive political transition based on democratic principles. This study provides insight into the role of the media in disseminating humanist political discourse and the relevance of Gus Dur's ideas within the context of Indonesia's reform.*

Keywords:

Democracy, Pluralism, Political thoughts of Gus Dur

Abstrak: Penelitian ini menelusuri pemikiran politik Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang dimuat di koran Petisi selama periode 1998-1999. Fokus utama adalah bagaimana Gus Dur menyampaikan ide-ide tentang demokrasi, pluralisme, hak asasi manusia, dan transisi politik pasca-Orde Baru melalui media massa. Koran Petisi berperan penting sebagai wadah penyampaian gagasan progresif selama masa reformasi. Metode kajian pustaka digunakan untuk menganalisis tulisan Gus Dur, termasuk tema-tema kunci seperti perlindungan minoritas, stabilitas politik, dan pemisahan agama dari politik praktis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Gus Dur mendorong transisi politik yang damai, inklusif, dan berbasis pada prinsip-prinsip demokrasi. Penelitian ini memberikan wawasan tentang peran media dalam menyebarkan wacana politik yang humanis dan relevansi pemikiran Gus Dur dalam konteks reformasi Indonesia.

Kata Kunci:

Demokrasi, Pluralisme, Pemikiran politik Gus Dur

PENDAHULUAN

Latar belakang penelusuran pemikiran politik Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dalam koran Petisi pada periode 1998-1999 adalah upaya untuk memahami kontribusi intelektual dan politiknya dalam masa-masa kritis bagi bangsa Indonesia. Pada saat itu, Indonesia berada di persimpangan sejarah setelah berakhirnya kekuasaan Orde Baru yang telah berkuasa selama lebih dari tiga dekade. Reformasi yang diusung oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, aktivis, serta tokoh agama dan politik, membuka jalan bagi demokratisasi yang sangat dinantikan¹.

Tahun 1998 menjadi titik balik besar dalam sejarah Indonesia, ditandai dengan lengsernya Soeharto pada bulan Mei setelah tekanan dari berbagai kelompok masyarakat yang menuntut perubahan signifikan dalam pemerintahan dan sistem politik. Di tengah masa transisi ini, muncul banyak figur yang mengisi panggung politik nasional dengan ide-ide segar dan gagasan reformasi yang melibatkan penegakan demokrasi, hak asasi manusia, serta keterbukaan dalam politik dan ekonomi. Gus Dur, sebagai seorang tokoh agama dan pemimpin masyarakat yang memiliki visi kuat tentang demokrasi dan pluralisme, menjadi salah satu aktor penting dalam dinamika ini².

Gus Dur adalah sosok yang memiliki latar belakang kuat dalam pendidikan Islam, budaya, dan politik, serta selalu dikenal karena pemikirannya yang inklusif dan progresif. Sebagai pemimpin Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di Indonesia, Gus Dur bukan hanya dikenal di kalangan umat Islam, tetapi juga memiliki pengaruh besar di tingkat nasional. Pandangannya tentang kebebasan beragama, hak asasi manusia, dan perlindungan terhadap minoritas sering kali berbeda dari banyak tokoh politik lain pada masa itu, yang masih terpengaruh oleh retorika Orde Baru.

Pada masa Reformasi, koran Petisi menjadi salah satu media yang memainkan peran signifikan sebagai wadah bagi para pemikir dan intelektual untuk menyuarakan ide-ide reformasi mereka, termasuk Gus Dur. Media massa, terutama koran, memiliki peran sentral dalam menyampaikan informasi, kritik, dan pandangan politik di tengah keterbukaan pasca-Orde Baru. Petisi menjadi medium bagi Gus Dur untuk mengomunikasikan ide-idenya secara langsung kepada masyarakat luas, terutama pada isu-isu penting seperti transisi demokrasi, pemilu yang adil, pluralisme, dan keadilan sosial. Pemikiran politik

¹ Greg Barton, Abdurrahman Wahid: Muslim Democrat, Indonesian President (Sydney: UNSW Press, 2002).

² S. Arif, "Islam dan Pancasila Pasca Reformasi: Pandangan Kritis Nahdlatul Ulama," Tashwirul Afkar 38, no. 2 (2020).

Gus Dur yang dimuat di Petisi pada periode 1998-1999 banyak menyoroti berbagai aspek penting dalam proses transisi politik Indonesia³.

Di satu sisi, Gus Dur menekankan pentingnya menjaga stabilitas politik melalui transisi yang damai dan inklusif. Ia berpendapat bahwa transisi ini harus melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk kelompok-kelompok minoritas yang selama era Orde Baru sering kali dipinggirkan atau bahkan ditindas. Baginya, demokrasi yang sejati harus mencerminkan keberagaman Indonesia dan memberikan ruang bagi semua kelompok, baik mayoritas maupun minoritas, untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Di sisi lain, Gus Dur juga menyoroti pentingnya memisahkan agama dari politik praktis. Walaupun ia seorang tokoh Islam yang sangat dihormati, Gus Dur selalu menekankan bahwa agama harus menjadi sumber moralitas dalam politik, bukan alat untuk memperoleh kekuasaan.

Dalam pandangannya, penggunaan agama sebagai alat politik dapat merusak tatanan demokrasi dan menciptakan ketegangan yang tidak perlu di antara berbagai kelompok di masyarakat. Inilah yang menjadi salah satu pilar pemikiran Gus Dur: bahwa Indonesia sebagai negara plural harus mampu menjaga kebhinekaan, termasuk dalam konteks kehidupan beragama. Pemikiran Gus Dur tentang pluralisme juga mencakup isu-isu global.

Pada masa krisis politik domestik, ia sering kali merujuk pada contoh-contoh internasional untuk memperlihatkan pentingnya kesetaraan dan toleransi di antara berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya. Baginya, pengalaman-pengalaman dari negara lain yang berhasil menjaga keberagaman dalam demokrasi dapat menjadi pelajaran penting bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan masa depan. Penelusuran terhadap pemikiran politik Gus Dur dalam koran Petisi periode 1998-1999 memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana seorang tokoh intelektual Muslim memandang transisi politik di Indonesia pasca-Orde Baru⁴.

Koran Petisi menjadi salah satu media penting di mana Gus Dur dapat secara bebas menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, menawarkan solusi bagi berbagai masalah bangsa, serta mempromosikan gagasan reformasi yang bertumpu pada demokrasi, hak asasi manusia, dan pluralisme. Dalam

³ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 2003).

⁴ Greg Fealy dan Sally White, *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2008).

setiap tulisannya, Gus Dur menunjukkan kepeduliannya terhadap nasib bangsa dan masa depan Indonesia yang lebih inklusif dan demokratis.

Melalui analisis terhadap tulisan-tulisan Gus Dur di Petisi, kita dapat melihat bagaimana media massa memainkan peran penting dalam menyebarkan gagasan politik progresif di tengah krisis nasional. Gus Dur memanfaatkan media ini tidak hanya untuk berkomunikasi dengan elite politik, tetapi juga dengan masyarakat luas, sehingga pemikirannya dapat menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas.

METODE PENELITIAN

Latar belakang penelusuran pemikiran politik Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dalam koran Petisi pada periode 1998-1999 adalah upaya untuk memahami kontribusi intelektual dan politiknya dalam masa-masa kritis bagi bangsa Indonesia. Pada saat itu, Indonesia berada di persimpangan sejarah setelah berakhirnya kekuasaan Orde Baru yang telah berkuasa selama lebih dari tiga dekade. Reformasi yang diusung oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, aktivis, serta tokoh agama dan politik, membuka jalan bagi demokratisasi yang sangat dinantikan⁵.

Tahun 1998 menjadi titik balik besar dalam sejarah Indonesia, ditandai dengan lengsernya Soeharto pada bulan Mei setelah tekanan dari berbagai kelompok masyarakat yang menuntut perubahan signifikan dalam pemerintahan dan sistem politik. Di tengah masa transisi ini, muncul banyak figur yang mengisi panggung politik nasional dengan ide-ide segar dan gagasan reformasi yang melibatkan penegakan demokrasi, hak asasi manusia, serta keterbukaan dalam politik dan ekonomi. Gus Dur, sebagai seorang tokoh agama dan pemimpin masyarakat yang memiliki visi kuat tentang demokrasi dan pluralisme, menjadi salah satu aktor penting dalam dinamika ini⁶.

Gus Dur adalah sosok yang memiliki latar belakang kuat dalam pendidikan Islam, budaya, dan politik, serta selalu dikenal karena pemikirannya yang inklusif dan progresif. Sebagai pemimpin Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di Indonesia, Gus Dur bukan hanya dikenal di kalangan umat Islam, tetapi juga memiliki pengaruh besar di tingkat nasional. Pandangannya tentang kebebasan beragama, hak asasi manusia, dan perlindungan terhadap minoritas sering kali berbeda dari banyak tokoh politik lain pada masa itu, yang masih terpengaruh oleh retorika Orde Baru.

⁵ Greg Barton, *Abdurrahman Wahid: Muslim Democrat, Indonesian President* (Sydney: UNSW Press, 2002).

⁶ S. Arif, "Islam dan Pancasila Pasca Reformasi: Pandangan Kritis Nahdlatul Ulama," *Tashwirul Afkar* 38, no. 2 (2020).

Pada masa Reformasi, koran Petisi menjadi salah satu media yang memainkan peran signifikan sebagai wadah bagi para pemikir dan intelektual untuk menyuarakan ide-ide reformasi mereka, termasuk Gus Dur. Media massa, terutama koran, memiliki peran sentral dalam menyampaikan informasi, kritik, dan pandangan politik di tengah keterbukaan pasca-Orde Baru. Petisi menjadi medium bagi Gus Dur untuk mengomunikasikan ide-idenya secara langsung kepada masyarakat luas, terutama pada isu-isu penting seperti transisi demokrasi, pemilu yang adil, pluralisme, dan keadilan sosial. Pemikiran politik Gus Dur yang dimuat di Petisi pada periode 1998-1999 banyak menyoroti berbagai aspek penting dalam proses transisi politik Indonesia⁷.

Di satu sisi, Gus Dur menekankan pentingnya menjaga stabilitas politik melalui transisi yang damai dan inklusif. Ia berpendapat bahwa transisi ini harus melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk kelompok-kelompok minoritas yang selama era Orde Baru sering kali dipinggirkan atau bahkan ditindas. Baginya, demokrasi yang sejati harus mencerminkan keberagaman Indonesia dan memberikan ruang bagi semua kelompok, baik mayoritas maupun minoritas, untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Di sisi lain, Gus Dur juga menyoroti pentingnya memisahkan agama dari politik praktis. Walaupun ia seorang tokoh Islam yang sangat dihormati, Gus Dur selalu menekankan bahwa agama harus menjadi sumber moralitas dalam politik, bukan alat untuk memperoleh kekuasaan.

Dalam pandangannya, penggunaan agama sebagai alat politik dapat merusak tatanan demokrasi dan menciptakan ketegangan yang tidak perlu di antara berbagai kelompok di masyarakat. Inilah yang menjadi salah satu pilar pemikiran Gus Dur: bahwa Indonesia sebagai negara plural harus mampu menjaga kebhinekaan, termasuk dalam konteks kehidupan beragama. Pemikiran Gus Dur tentang pluralisme juga mencakup isu-isu global.

Pada masa krisis politik domestik, ia sering kali merujuk pada contoh-contoh internasional untuk memperlihatkan pentingnya kesetaraan dan toleransi di antara berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya. Baginya, pengalaman-pengalaman dari negara lain yang berhasil menjaga keberagaman dalam demokrasi dapat menjadi pelajaran penting bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan masa depan. Penelusuran terhadap pemikiran politik Gus Dur dalam koran Petisi periode 1998-1999 memberikan gambaran

⁷ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 2003).

komprehensif tentang bagaimana seorang tokoh intelektual Muslim memandang transisi politik di Indonesia pasca-Orde Baru⁸.

Koran Petisi menjadi salah satu media penting di mana Gus Dur dapat secara bebas menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, menawarkan solusi bagi berbagai masalah bangsa, serta mempromosikan gagasan reformasi yang bertumpu pada demokrasi, hak asasi manusia, dan pluralisme. Dalam setiap tulisannya, Gus Dur menunjukkan kepeduliannya terhadap nasib bangsa dan masa depan Indonesia yang lebih inklusif dan demokratis.

Melalui analisis terhadap tulisan-tulisan Gus Dur di Petisi, kita dapat melihat bagaimana media massa memainkan peran penting dalam menyebarkan gagasan politik progresif di tengah krisis nasional. Gus Dur memanfaatkan media ini tidak hanya untuk berkomunikasi dengan elite politik, tetapi juga dengan masyarakat luas, sehingga pemikirannya dapat menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konteks Politik Indonesia di Era 1998-1999

Pada 1998, krisis ekonomi melanda Indonesia, memperburuk ketidakpuasan terhadap Orde Baru di bawah Presiden Soeharto yang berkuasa sejak 1966. Gelombang demonstrasi mahasiswa di berbagai kota menuntut reformasi dan pengunduran diri Soeharto. Pada Mei 1998, Soeharto akhirnya mundur setelah tekanan kuat dari rakyat dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Masa pemerintahan Habibie (1998-1999) berfokus pada reformasi politik dan pemulihan ekonomi. Habibie memperkenalkan kebebasan pers, membebaskan tahanan politik, dan membuka ruang bagi pemilu demokratis⁹.

Pemilu 1999 diikuti banyak partai baru dan lama, seperti PDI Perjuangan, Golkar, PKB, dan PAN. Pemilu ini menjadi titik awal transisi demokrasi, dengan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) terpilih sebagai presiden melalui proses pemilihan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Setelah terpilih, Gus Dur mencoba menerapkan reformasi di berbagai bidang, termasuk pemberantasan korupsi, desentralisasi kekuasaan, dan upaya penyelesaian konflik di wilayah seperti Aceh. Namun, gaya kepemimpinannya yang sering tidak terduga dan

⁸ Greg Fealy dan Sally White, *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2008).

⁹ Nanda Putra, "Media Massa dan Politik Islam Pasca Reformasi 1998: Studi Historis Komparatif dan Ekonomi Politik di Sumatera Utara," *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 3, no. 1 (2019): 1-18.

keputusan-keputusan yang dianggap kontroversial, seperti membubarkan Departemen Sosial dan Kementerian Penerangan tanpa konsultasi dengan DPR, memicu ketegangan politik¹⁰.

Partai-partai besar seperti PDI Perjuangan dan Golkar, yang semula mendukung Gus Dur, mulai membentuk oposisi karena merasa terpinggirkan dalam pemerintahan. Ketegangan ini semakin memuncak ketika Gus Dur mengeluarkan dekrit yang membubarkan parlemen dan memberlakukan keadaan darurat. Langkah ini ditolak oleh MPR dan DPR, yang kemudian mengadakan sidang istimewa untuk memakzulkan Gus Dur pada 2001. Megawati Soekarnoputri, yang saat itu menjabat wakil presiden, diangkat sebagai presiden, menandai akhir pemerintahan Gus Dur yang penuh dengan dinamika politik dan oposisi keras dari partai-partai besar.

Sebelum menjadi presiden, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) merupakan salah satu tokoh penting yang mengambil peran kritis dalam mengoposisikan dirinya terhadap rezim Soeharto. Sebagai Ketua Umum Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di Indonesia, Gus Dur sering mengutarakan kritiknya terhadap pemerintahan Orde Baru, meskipun dalam kerangka yang hati-hati dan tak langsung. Di masa ketika Soeharto memegang kendali penuh atas kehidupan politik, Gus Dur memilih jalur intelektual dan kultural, mendorong demokrasi, pluralisme, dan hak asasi manusia di Indonesia. Salah satu bentuk oposisi penting Gus Dur adalah menolak dominasi negara atas organisasi-organisasi masyarakat, termasuk upaya pemerintah Orde Baru yang berusaha mengontrol NU¹¹.

Di akhir 1980-an, Gus Dur memperjuangkan kemandirian NU dengan menarik NU keluar dari politik praktis dan fokus pada kegiatan sosial-keagamaan. Namun, sikap kritis Gus Dur terhadap rezim Soeharto semakin tajam seiring meningkatnya otoritarianisme dan korupsi dalam pemerintahan. Pada 1990-an, Gus Dur lebih vokal dalam menyerukan reformasi dan mendukung perubahan politik yang lebih demokratis. Ia terlibat dalam berbagai forum intelektual dan diskusi yang menentang kebijakan-kebijakan Soeharto¹².

Walaupun tidak pernah secara langsung memimpin gerakan oposisi seperti para aktivis mahasiswa, Gus Dur memiliki posisi moral yang kuat sebagai

¹⁰ Robert W. Hefner, *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia* (Princeton: Princeton University Press, 2000).

¹¹ Zainal Setiawan, "Pemikiran dan Kebijakan Nahdlatul Ulama dalam Menjaga Kedaulatan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Era Reformasi (1998–2009)," *Spektrum* 7, no. 1 (2010).

¹² Muhammad Husni, *Pendidikan Pesantren Perspektif KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)* (Malang: Uwais Inspirasi Indonesia, 2021).

pemimpin agama yang dihormati, sehingga kritiknya terhadap Soeharto mendapatkan perhatian luas. Setelah runtuhnya Orde Baru pada 1998, Gus Dur berperan penting dalam proses transisi menuju demokrasi, di mana ia kemudian terpilih menjadi presiden pada 1999. Posisi Gus Dur sebagai oposisi moral terhadap rezim Soeharto menjadi salah satu fondasi yang membuatnya dipandang sebagai tokoh yang bisa memimpin Indonesia pasca-Orde Baru, meskipun gaya kepemimpinannya yang sering dianggap tidak konvensional kemudian memicu berbagai tantangan politik.

Gusdur Intelektual Muslim dan Pemimpin Nasional

Abdurrahman Wahid, atau yang lebih dikenal sebagai Gus Dur, adalah sosok intelektual Muslim dan pemimpin nasional yang sangat dihormati di Indonesia. Lahir pada 7 September 1940, Gus Dur tumbuh dalam lingkungan pesantren yang menjadikannya sosok yang sarat dengan pengetahuan keislaman dan intelektualisme. Ia merupakan cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di Indonesia, yang menanamkan dasar-dasar Islam moderat dan inklusif sejak dini dalam dirinya.

Sebagai seorang intelektual Muslim, Gus Dur dikenal dengan pemikiran-pemikiran progresifnya, yang memperjuangkan Islam yang ramah, toleran, dan inklusif. Ia sering menyuarakan pentingnya dialog antaragama dan memperjuangkan hak-hak minoritas, baik secara agama maupun etnis, di Indonesia. Pemikirannya melampaui batas-batas tradisional Islam konservatif dan berupaya menjembatani antara modernitas dan nilai-nilai keagamaan. Gus Dur percaya bahwa Islam harus beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan esensi ajaran yang penuh dengan kasih sayang dan keadilan sosial¹³.

Selain kiprahnya sebagai pemikir dan intelektual, Gus Dur juga memainkan peran penting sebagai pemimpin nasional. Ia menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia ke-4 pada tahun 1999-2001, di mana masa kepemimpinannya bertepatan dengan transisi demokrasi setelah runtuhnya rezim Orde Baru. Meskipun masa jabatannya singkat, Gus Dur memberikan dampak signifikan dalam memperjuangkan demokratisasi dan kebebasan sipil di Indonesia. Ia dikenal dengan keberaniannya dalam membela hak-hak masyarakat marginal, serta sikapnya yang tidak segan-segan mengambil keputusan kontroversial demi menjaga kerukunan dan keadilan di masyarakat¹⁴.

¹³ Taufani Taufani, "Pemikiran Pluralisme Gus Dur," *Jurnal Dakwah Tabligh* 19, no. 2 (2018): 198–217.

¹⁴ Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Budaya* (Jakarta: Desantara, 2006).

Abdurrahman Wahid, atau Gus Dur, memiliki latar belakang pendidikan yang sangat beragam dan luas, yang sangat mempengaruhi cara berpikir serta pandangannya sebagai seorang intelektual Muslim dan pemimpin nasional. Berikut adalah gambaran singkat tentang riwayat pendidikan Gus Dur dan bagaimana pendidikan tersebut mempengaruhi pemikirannya: Riwayat Pendidikan Gus Dur:

1. Pendidikan Dasar di Pesantren : Gus Dur lahir dari keluarga pesantren, dengan kakeknya, KH. Hasyim Asy'ari, merupakan pendiri Nahdlatul Ulama (NU). Ia mengenyam pendidikan dasar di lingkungan pesantren, tempat di mana ia belajar ilmu agama, khususnya tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jama'ah yang moderat. Lingkungan ini menanamkan dasar-dasar pemikiran Islam yang inklusif dan toleran.

2. Pendidikan di Yogyakarta dan Jakarta : Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, Gus Dur melanjutkan studi di Yogyakarta dan kemudian pindah ke Jakarta untuk belajar di Universitas Indonesia (UI) pada program studi Sastra. Namun, di UI, Gus Dur hanya mengikuti studi selama setahun karena minatnya lebih besar dalam studi keagamaan.

3. Studi di Timur Tengah Pada tahun 1963, Gus Dur melanjutkan pendidikan ke Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, yang terkenal sebagai salah satu pusat studi Islam terbesar di dunia. Di Al-Azhar, ia belajar bahasa Arab dan mendalami ilmu-ilmu agama. Namun, Gus Dur merasa bahwa sistem pendidikan di sana terlalu formal dan kaku, sehingga ia tidak merasa cocok. Karena itu, Gus Dur memutuskan untuk pindah ke Baghdad, Irak.

4. Universitas Baghdad, Irak Di Universitas Baghdad, Gus Dur melanjutkan studi Islam di fakultas Sastra. Pengalaman di Baghdad membentuk pemikirannya secara lebih terbuka, karena ia bertemu dengan berbagai macam mahasiswa dari latar belakang yang berbeda, baik dari segi agama maupun etnis. Di sini, ia juga mulai mengembangkan pandangan pluralisme dan keterbukaan terhadap perbedaan.

5. Studi di Eropa Setelah menyelesaikan pendidikannya di Baghdad, Gus Dur sempat melanjutkan studi di Belanda dan Prancis, meskipun tidak dalam jangka waktu yang lama. Pengalaman di Eropa membuka wawasannya terhadap pemikiran-pemikiran Barat, khususnya dalam bidang demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan berekspresi.

Salah satu pemikiran Gus Dur yang paling menonjol adalah tentang pluralisme dan toleransi. Ia meyakini bahwa keberagaman adalah anugerah yang harus dirayakan, bukan dipertentangkan. Dalam pandangannya, Indonesia sebagai negara dengan berbagai suku, agama, dan budaya harus mampu menghargai perbedaan. Gus Dur sering kali mengajak masyarakat untuk

berdialog dan memahami sudut pandang orang lain, sehingga tercipta harmoni dalam kehidupan berbangsa.

Gus Dur juga dikenal sebagai pembela hak asasi manusia. Ia berani bersuara untuk mereka yang terpinggirkan, termasuk kaum perempuan dan minoritas. Dalam banyak kesempatan, ia menekankan pentingnya keadilan sosial dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Pemikirannya ini mendorong banyak orang untuk lebih peka terhadap isu-isu sosial dan menjadi advokat bagi perubahan. Di bidang pendidikan, Gus Dur mengusung gagasan tentang pendidikan yang inklusif dan merata. Ia percaya bahwa akses terhadap pendidikan adalah hak setiap anak bangsa, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi.

Dengan pendekatan ini, ia berkontribusi pada pengembangan sistem pendidikan yang lebih baik di Indonesia. Dalam konteks politik, Gus Dur mengadvokasi demokrasi yang sehat dan partisipatif. Ia menentang segala bentuk otoritarianisme dan korupsi, mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam pemerintahan. Pemikirannya tentang demokrasi tidak hanya terbatas pada pemilihan umum, tetapi juga mencakup partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan¹⁵.

Pengaruh Gus Dur masih terasa hingga kini. Banyak generasi muda yang terinspirasi oleh pemikirannya untuk terus memperjuangkan nilai-nilai toleransi, keadilan, dan demokrasi. Dalam era di mana polarisasi sosial sering terjadi, warisan pemikiran Gus Dur menjadi penting sebagai pengingat akan pentingnya dialog dan saling menghormati. Gus Dur adalah sosok yang membuktikan bahwa intelektualisme dan kepemimpinan nasional tidak harus terpisah. Sebagai seorang pemimpin dan cendekiawan Muslim, ia terus dikenang sebagai tokoh yang berjuang untuk pluralisme, kemanusiaan, dan demokrasi di Indonesia. Warisan pemikiran dan kepemimpinannya terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi selanjutnya.

Analisis Pemikiran Politik Gusdur dalam Koran Petisi Tahun 1998-1999

Koran Petisi adalah salah satu media yang muncul dan berperan penting pada masa transisi politik Indonesia menjelang dan selama era Reformasi. Diterbitkan pada akhir 1990-an, Petisi menjadi salah satu platform bagi tokoh-tokoh intelektual dan aktivis, termasuk Abdurrahman Wahid (Gus Dur), untuk menyuarakan pandangan politik mereka. Pada masa tersebut, kebebasan pers

¹⁵ Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi* (Jakarta: The Wahid Institute, 2003).

mulai berkembang pesat seiring dengan runtuhnya rezim Orde Baru yang sebelumnya mengontrol ketat media massa. Koran Petisi dikenal sebagai media yang menyuarakan isu-isu politik, demokrasi, dan hak asasi manusia. Dalam publikasi-publikasinya, Petisi sering kali mengkritik kebijakan pemerintah dan mengangkat tema-tema penting seperti pluralisme, reformasi politik, serta keadilan sosial. Dengan munculnya media ini, pemikiran tokoh-tokoh progresif seperti Gus Dur dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat luas, memberikan wacana alternatif di tengah krisis politik dan sosial yang melanda Indonesia pada akhir 1990-an¹⁶.

"Koran Omong Kosong Rezim di Koran Petisi" mencerminkan kritik tajam terhadap pemerintahan yang berkuasa pada masa transisi politik Indonesia pada akhir 1990-an. Pada masa itu, setelah jatuhnya rezim Orde Baru di bawah Soeharto pada Mei 1998, media massa menjadi platform penting bagi oposisi politik, intelektual, dan aktivis untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap pemerintah dan memberikan pandangan kritis terhadap kondisi negara. Koran *Petisi* merupakan salah satu media yang muncul dalam konteks ini, dikenal dengan sikapnya yang vokal terhadap isu-isu politik, demokrasi, dan hak asasi manusia. Dengan mengusung tajuk seperti "Koran Omong Kosong Rezim," *Petisi* ingin menyoroti kebijakan pemerintah yang dianggap tidak substansial, penuh janji kosong, dan tidak memberikan solusi nyata terhadap krisis multidimensional yang dihadapi Indonesia pada masa itu. Penggunaan frasa "omong kosong" secara jelas merupakan bentuk penolakan terhadap narasi yang dibangun pemerintah, yang seringkali tidak sejalan dengan kenyataan di lapangan, terutama dalam hal kesejahteraan masyarakat dan reformasi institusional. Pada periode 1998-1999, masyarakat Indonesia mengalami kebangkitan kesadaran politik, dan media seperti *Petisi* memainkan peran penting dalam membentuk opini publik. Koran ini menjadi wadah di mana tokoh-tokoh seperti Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang dirasa gagal mencerminkan semangat reformasi. Kritik terhadap rezim, baik yang otoriter maupun yang lahir dalam masa transisi, tidak hanya ditujukan pada pemerintahan sebelumnya, tetapi juga pada aktor-aktor politik baru yang gagal memberikan arah yang jelas bagi perbaikan bangsa. Melalui tulisan-tulisan yang diterbitkan, *Petisi* menuntut adanya perubahan nyata dalam sistem politik, ekonomi, dan sosial. Koran ini mengedepankan pentingnya akuntabilitas pemerintah, transparansi, serta perlindungan hak-hak asasi manusia. Dalam kritiknya, *Petisi* juga berusaha untuk menyadarkan publik akan pentingnya peran media sebagai kontrol terhadap kekuasaan,

¹⁶ Abdurrahman Wahid, "Pemikiran Politik Gus Dur di Koran Petisi," Petisi (1998-1999).

terutama setelah kebebasan pers mulai lebih dihargai pasca runtuhnya Orde Baru.

Judul "Koran Amin Rais Tidak Berani Maju di Koran Petisi" mencerminkan dinamika politik yang terjadi pada era Reformasi di Indonesia, khususnya mengenai peran tokoh-tokoh penting yang menjadi pusat perhatian publik. Amien Rais, seorang politisi dan akademisi yang dikenal sebagai tokoh sentral dalam gerakan reformasi, sering menjadi sorotan media pada akhir 1990-an karena kiprahnya yang signifikan dalam menentang rezim Orde Baru. Pada masa transisi menuju demokrasi, Amien Rais dipandang sebagai pemimpin yang berpotensi besar untuk mengambil posisi lebih tinggi dalam pemerintahan, bahkan banyak yang menganggapnya layak mencalonkan diri sebagai presiden. Namun, pemberitaan dengan judul seperti "Amin Rais Tidak Berani Maju" di *Koran Petisi* memperlihatkan ketidakpastian dan dilema politik yang dihadapi oleh Amien Rais pada saat itu. Judul tersebut secara tidak langsung mengisyaratkan kekecewaan atau kritik terhadap langkah Amien Rais yang dianggap tidak mengambil tindakan lebih berani atau tegas dalam memimpin gerakan reformasi menuju puncak kekuasaan. *Petisi*, yang dikenal sebagai media dengan sikap vokal dan kritis terhadap berbagai figur politik, menggunakan judul ini untuk mempertanyakan keberanian dan komitmen Amien Rais dalam menghadapi tantangan politik yang ada. Di tengah situasi krisis yang memerlukan pemimpin dengan visi jelas dan ketegasan dalam bertindak, judul ini juga mengekspresikan rasa frustrasi publik terhadap tokoh yang selama ini dipandang sebagai simbol perlawanan terhadap Orde Baru, namun dinilai kurang tegas dalam mengambil peran utama di pemerintahan pasca-reformasi. Meskipun Amien Rais memiliki peran penting dalam menjatuhkan Soeharto dan membentuk arah politik baru Indonesia, narasi yang diangkat *Petisi* ini mungkin mencerminkan ketidaksesuaian antara harapan masyarakat terhadap dirinya dan langkah-langkah politik yang diambil. Penggunaan frasa "tidak berani maju" secara implisit menekankan adanya peluang besar yang tidak diambil oleh Amien Rais, dan ini membuka perdebatan lebih luas tentang kepemimpinan politik di masa transisi demokrasi Indonesia¹⁷.

Judul "NU Terus Mengawal Negara di Koran Petisi" menggambarkan peran strategis Nahdlatul Ulama (NU) dalam perjalanan politik Indonesia, terutama pada masa transisi menuju era Reformasi¹⁸. Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU memiliki pengaruh yang signifikan dalam menjaga

¹⁷ Abdurrahman Wahid, "Pemikiran Politik Gus Dur di Koran Petisi," Petisi (1998–1999).

¹⁸ Abdurrahman Wahid, "Pemikiran Politik Gus Dur di Koran Petisi," Petisi (1998–1999).

stabilitas sosial dan politik, serta dalam membentuk arah masa depan bangsa. Judul ini menunjukkan bagaimana NU, dengan tradisi keislamannya yang moderat dan inklusif, mengambil peran aktif dalam mengawal proses perubahan politik yang terjadi pasca runtuhnya Orde Baru. Di tengah gejolak politik yang melanda Indonesia pada akhir 1990-an, peran NU menjadi sangat penting, terutama dalam upaya menjaga persatuan di tengah keragaman agama, etnis, dan budaya di Indonesia. NU, yang dipimpin oleh tokoh-tokoh visioner seperti Abdurrahman Wahid (Gus Dur), berkomitmen untuk memastikan bahwa perubahan yang terjadi di Indonesia tidak hanya membawa demokratisasi, tetapi juga tetap menjunjung tinggi nilai-nilai pluralisme, toleransi, dan keadilan sosial. Melalui judul "NU Terus Mengawal Negara," **Koran Petisi** mengisyaratkan bahwa organisasi ini tidak hanya fokus pada isu-isu keagamaan, tetapi juga secara aktif berpartisipasi dalam proses politik dan pemerintahan. NU terus hadir sebagai kekuatan moral yang mengawasi arah kebijakan negara, terutama dalam memastikan bahwa agenda reformasi berjalan dengan lancar, tanpa mengorbankan kepentingan rakyat kecil atau kelompok-kelompok yang rentan. Dalam banyak hal, NU dilihat sebagai penjaga stabilitas sosial, yang berusaha menghindari polarisasi yang dapat merusak harmoni nasional. Dengan semangat kebangsaan dan kesadaran akan pentingnya integritas nasional, NU melalui berbagai program dan aktivitasnya memberikan panduan moral kepada para pemimpin politik dan masyarakat. **Petisi**, melalui liputannya, menyoroti bagaimana NU tidak hanya berperan dalam menjaga keutuhan negara secara fisik, tetapi juga mengawal nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia di tengah arus perubahan yang terjadi.

Dalam konteks ketiga judul tersebut, pemikiran Gus Dur tentang politik, kepemimpinan, dan peran organisasi keagamaan menonjol sebagai gagasan yang menekankan pada keberanian, ketegasan, dan peran moral yang kuat dalam menghadapi tantangan negara. Gus Dur tidak hanya menjadi kritikus rezim dan tokoh yang berani menghadapi kekuasaan, tetapi juga seorang pemimpin yang percaya bahwa masa depan bangsa harus dikawal oleh prinsip-prinsip yang adil dan inklusif.

Kesimpulan

Penelusuran pemikiran politik Gus Dur melalui koran *Petisi* selama periode 1998-1999 memperlihatkan bahwa Gus Dur adalah salah satu tokoh yang memimpin wacana politik di masa transisi Indonesia menuju demokrasi. Pemikirannya yang inklusif, pluralis, dan humanis tercermin jelas dalam berbagai tulisan yang diterbitkan di media ini. *Koran Petisi* memainkan peran

penting dalam menyiarkan gagasan-gagasan Gus Dur yang menekankan pentingnya demokrasi, reformasi, dan perlindungan terhadap minoritas di tengah krisis politik yang melanda Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, S. (2020). Islam dan Pancasila Pasca Reformasi: Pandangan Kritis Nahdlatul Ulama. *Tashwirul Afkar*, 38(2).
- Barton, G. W. (2002). *Abdurrahman Wahid: Muslim democrat, Indonesian president*. UNSW Press.
- Bungin, B. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Effendy, B. (2003). *Islam dan negara: Transformasi pemikiran dan praktik politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Fealy, G., & White, S. (2008). *Expressing Islam: Religious life and politics in Indonesia*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Firdaus, R. (2020). *Etika Berpolitik Dalam Pemikiran Abdurrahman Wahid (Gusdur) Dengan Relevansi Perkembangan Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Di Indonesia (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung)*.
- Hefner, R. W. (2000). *Civil Islam: Muslims and democratization in Indonesia*. Princeton University Press.
- Husni, M. (2021). *Pendidikan Pesantren Perspektif KH. Abdurrahman Wahid (Gusdur)*. *uwais inspirasi indonesia*.
- Husni, M. (2021). *Pendidikan pesantren perspektif KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)*. *Uwais Inspirasi Indonesia*.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Syukri, N., & Aep Saepul, U. (2020). *TINJAUAN PUSTAKA SISTEMATIS: pengantar metode penelitian sekunder untuk energi terbarukan-bioenergi*.
- Putra, N. (2019). *Media Massa dan Politik Islam Pasca Reformasi 1998 (Studi Historis Komparatif dan Ekonomi Politik di Sumatera Utara)*. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(1), 1-18.
- Putra, N. (2019). *Media massa dan politik Islam pasca reformasi 1998: Studi historis komparatif dan ekonomi politik di Sumatera Utara*. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(1), 1-18.

- Setiawan, Z. (2010). Pemikiran dan Kebijakan Nahdlatul Ulama dalam Menjaga Kedaulatan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Era Reformasi (1998-2009). *Spektrum*, 7(1).
- Setiawan, Z. (2010). Pemikiran dan kebijakan Nahdlatul Ulama dalam menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada era reformasi (1998-2009). *Spektrum*, 7(1).
- Syukri, N. M., & Saepul, U. A. (2020). Tinjauan pustaka sistematis: Pengantar metode penelitian sekunder untuk energi terbarukan-bioenergi.
- Taufani, T. (2018). Pemikiran Pluralisme Gusdur. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 19(2), 198-217.
- Wahid, A. (1998-1999). Pemikiran politik Gus Dur di koran Petisi.
- Wahid, A. (1999). Gus Dur menggagas pluralisme dan demokrasi. Jakarta: LP3ES.
- Wahid, A. (2003). *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama masyarakat negara demokrasi*. Jakarta: The Wahid Institute.
- Wahid, A. (2006). *Pergulatan negara, agama, dan budaya*. Jakarta: Desantara.